

SKRIPSI

BUNGERAN OCKTOPHIANUS

FRANCHISING SEBAGAI SUATU LEMBAGA HUKUM

DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2004

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FRANCHISING SEBAGAI SUATU LEMBAGA HUKUM
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA**

SKRIPSI

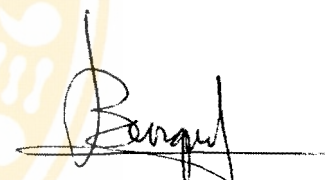
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H.,MS
NIP. 130 675 526

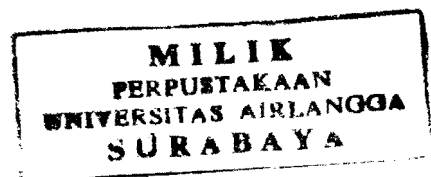
Penulis,



Bungaran Ocktofianus
NIM. 039714537

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya perjanjian franchise maka mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terikat didalamnya, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik pemberi franchise (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee).
- b. Penyelesaian hukum sengketa perjanjian franchise dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:
 1. Melalui pengadilan.
 2. Melalui lembaga arbitrase, terdiri dari dua (2) lembaga yaitu:
 - Lembaga Arbitrase Ad Hoc;
 - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya para pihak yang terikat dalam perjanjian franchise melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan itikad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing..
- b. Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian franchise para pihak harus mencantumkan dua (2) macam klausula didalamnya, yaitu:
 - Klausula arbitrase sebelum sengketa;
 - Klausula arbitrase setelah sengketa.

